

Analisis Kebijakan Pembiayaan Publik: Makna Strategis APBN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tiara Marsya Aulya¹, Nayla Ahlami Dalimunthe², Cintya Putri Nasution³, Dia Aulia Harahap⁴, Suaini Mebia Putri⁵

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

tiaramarsyaaulia@gmail.com¹, naylaahlami7@gmail.com², putricintya623@gmail.com³, diaaulia720@gmail.com⁴, suainiputri52@gmail.com⁵

Diserahkan tanggal 12 September 2025 | Diterima tanggal 27 Desember 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2025

Abstract:

This article examines the strategic role of Indonesia's State Budget (APBN) in financing the development of the new capital city, Ibu Kota Nusantara (IKN). The scope of the discussion focuses on public financing policy, the fiscal rationale behind state-led investment, and the position of APBN in securing the early stages of national strategic projects. The study employs a qualitative research design using a document analysis approach to review official government sources, including the APBN, fiscal policy statements, planning documents for IKN, and publications issued by the Ministry of Finance, Bappenas, and the IKN Authority. The analysis reveals that APBN serves as the dominant and foundational instrument in the initial development phase, functioning not only as a direct funding source but also as a stabilizing mechanism that signals long-term governmental commitment. The findings further show that APBN operates as a trigger to attract non-budget financing by preparing essential infrastructure and reducing early-stage investment risks. However, the study also identifies potential fiscal pressures and governance challenges if diversification of financing does not progress as planned. Overall, the research highlights that APBN plays a strategic and multidimensional role in shaping the direction, credibility, and sustainability of IKN development.

Keywords: public financing, APBN, IKN development, fiscal policy, infrastructure

Abstrak :

Artikel ini membahas peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lingkup pembahasan mencakup kebijakan pembiayaan publik, dasar pertimbangan fiskal pada proyek berskala nasional, serta posisi APBN sebagai penopang utama pembangunan tahap awal. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, melalui analisis terhadap APBN, Nota Keuangan, dokumen perencanaan pembangunan IKN, serta publikasi resmi Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Otorita IKN. Hasil analisis menunjukkan bahwa APBN berperan secara dominan dan menjadi fondasi strategis dalam pembangunan IKN, tidak hanya sebagai sumber pendanaan langsung, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi yang menegaskan komitmen jangka panjang pemerintah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa APBN berfungsi sebagai pemicu untuk menarik pembiayaan non-APBN melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pengurangan risiko awal investasi. Namun demikian, kajian ini mengidentifikasi adanya potensi tekanan fiskal serta tantangan tata kelola yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa APBN memiliki makna strategis dalam menentukan arah, kredibilitas, dan kesinambungan pembangunan IKN.

Kata Kunci: pembiayaan publik, APBN, pembangunan IKN, kebijakan fiskal, infrastruktur

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan fiskal berskala besar, terutama untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, energi, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik. Pada fase awal pembangunan, negara dituntut untuk memastikan tersedianya pembiayaan yang memadai agar fondasi infrastruktur dapat diselesaikan sesuai target pembangunan. Kajian fiskal terbaru menegaskan bahwa investasi pemerintah melalui APBN memiliki peran sentral dalam mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan memperkuat kapasitas infrastruktur nasional, khususnya pada proyek-proyek yang bersifat public-led seperti pembangunan IKN (Putri et al., 2024).

Sebagai instrumen kebijakan fiskal utama, APBN berfungsi melakukan alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi, serta menjadi katalis bagi sektor-sektor prioritas. Dalam konteks proyek besar seperti IKN, APBN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan langsung, tetapi juga sebagai instrumen penjamin agar pembangunan tahap awal memiliki kepastian fiskal. Pengalaman Indonesia dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah melalui APBN berperan penting untuk menarik partisipasi pembiayaan non-APBN dan memberikan sinyal stabilitas jangka panjang kepada investor maupun institusi pembiayaan (Prajaningtyas & Dinarjito, 2025).

Dalam konteks tersebut, artikel ini berargumen bahwa posisi APBN dalam pembangunan IKN tidak hanya perlu dipahami sebagai instrumen pembiayaan awal, tetapi sebagai mekanisme strategis yang menentukan arah, keberlanjutan, dan kredibilitas proyek jangka panjang. Dominasi APBN pada fase awal dapat dilihat sebagai strategi fiskal untuk menciptakan pembagian risiko yang lebih proporsional sebelum menarik pendanaan non-APBN secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan publik termasuk struktur alokasi belanja, kapasitas fiskal, dan desain insentif bagi sektor swasta yang menjadi faktor kunci dalam memastikan apakah pembangunan IKN mampu menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang sepadan dengan investasi negara. Argumen ini menempatkan pembiayaan APBN sebagai fondasi strategis yang perlu dianalisis secara kritis untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis makna strategis APBN dalam pembangunan IKN melalui interpretasi dokumen resmi pemerintah, kajian pembiayaan publik, dan literatur akademik terbaru yang relevan. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman kritis mengenai posisi APBN dalam memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, sekaligus mengidentifikasi tantangan pembiayaan yang perlu diperbaiki agar sumber pendanaan non-APBN dapat dioptimalkan sesuai prinsip keberlanjutan fiskal dan tata kelola yang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, karena tujuan utamanya adalah menelaah kebijakan pembiayaan publik dan memahami makna strategis APBN dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui pembacaan serta interpretasi terhadap dokumen resmi pemerintah (Creswell, 2013). Target penelitian dalam konteks ini bukan berupa individu, melainkan himpunan dokumen yang merepresentasikan kebijakan fiskal negara. Dokumen yang dianalisis mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Nota Keuangan, dokumen perencanaan dan pengembangan IKN, kebijakan fiskal nasional, laporan realisasi anggaran, serta publikasi resmi dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Otorita IKN. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian (Bowen, 2009).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis dokumen dengan menelaah isi, konteks, arah kebijakan, dan penekanan strategis yang tertuang dalam setiap dokumen. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk kategori analitik yang disesuaikan dengan fokus kajian, meliputi fungsi APBN dalam pembiayaan publik, prioritas kebijakan fiskal terkait pembangunan IKN, serta efektivitas dan implikasi pembiayaan pada tahap awal pembangunan. Penyusunan kategori ini mengikuti pedoman analisis isi dan tematik dalam penelitian kualitatif (Miles et al., 2014).

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan, argumentasi fiskal, serta makna strategis yang tampak dalam dokumen kebijakan. Kehadiran peneliti berperan penting dalam proses interpretasi karena makna kebijakan dipahami melalui pembacaan mendalam serta pemaknaan terhadap konteks fiskal dan arah pembangunan nasional (Creswell & Poth, 2018). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dokumen dengan membandingkan berbagai sumber resmi, konsistensi antar dokumen, serta verifikasi konsep dengan teori kebijakan fiskal dan pembiayaan publik (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa temuan penelitian bersifat kredibel dan mencerminkan praktik kebijakan yang berlangsung.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Analisis Dokumen

Hasil analisis terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah menunjukkan bahwa APBN memiliki peran yang sangat dominan dalam tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dokumen APBN, laporan realisasi anggaran, serta publikasi Kementerian Keuangan dan Bappenas memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar IKN seperti jalan akses, jaringan air bersih, fasilitas pemerintahan, sampai kawasan hunian ASN sebagian besar didanai oleh APBN selama periode awal. Hal ini tampak dari alokasi belanja modal yang secara konsisten ditujukan untuk mempercepat kesiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terutama pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Ketergantungan ini terjadi karena investasi swasta dan skema pembiayaan non-APBN belum masuk secara signifikan, sehingga APBN menjadi instrumen utama yang memastikan keberlangsungan pembangunan.

Data dalam dokumen perencanaan IKN juga menunjukkan bahwa peran APBN pada tahap awal tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian pembangunan. Melalui alokasi tersebut, pemerintah memberikan sinyal bahwa pembangunan IKN merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang perlu mendapatkan dukungan anggaran negara agar progres fisik dapat berlangsung meskipun kontribusi swasta belum optimal. Dengan demikian, APBN tidak sekadar menjalankan fungsi pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi awal dan penggerak utama dalam mewujudkan tahap awal pembangunan IKN.

Makna Strategis APBN dalam Kebijakan Pembiayaan Publik

Analisis terhadap dokumen anggaran dan kebijakan fiskal menunjukkan bahwa APBN memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Makna strategis ini tampak pada beberapa aspek penting yang menjelaskan bagaimana APBN tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan.

1) APBN sebagai fondasi pembangunan infrastruktur dasar

Dokumen perencanaan IKN menegaskan bahwa infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan air bersih, fasilitas pemerintahan, dan hunian ASN harus dibangun oleh pemerintah karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat menunggu keterlibatan sektor swasta. APBN berfungsi sebagai fondasi yang memastikan pembangunan dapat dimulai,

memberikan kepastian bahwa tahap awal penyediaan fasilitas publik berjalan sesuai kebutuhan proyek strategis nasional tersebut.

- 2) APBN sebagai sinyal komitmen dan stabilitas kebijakan
Alokasi APBN yang konsisten dari tahun ke tahun memberikan sinyal kuat bahwa pembangunan IKN merupakan prioritas nasional. Investor dan pemangku kepentingan biasanya membutuhkan bukti konkret mengenai arah kebijakan sebelum terlibat dalam pembiayaan. Kebijakan fiskal yang secara jelas mendukung pembangunan IKN melalui APBN mencerminkan komitmen pemerintah serta stabilitas kebijakan, yang sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan publik maupun swasta.
- 3) APBN sebagai pemicu (trigger fund) bagi pendanaan non-APBN
APBN juga dirancang untuk berfungsi sebagai pemicu masuknya sumber pembiayaan lain, seperti investasi swasta dan skema KPBU. Dengan menyediakan infrastruktur dasar dan lingkungan pembangunan yang lebih siap, APBN menciptakan kondisi yang lebih menarik bagi sektor non-pemerintah. Fungsi pemicu ini penting dalam proyek jangka panjang seperti IKN, karena keberlanjutan pembiayaan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Oleh karena itu, penggunaan APBN pada tahap awal memiliki efek strategis dalam membuka ruang bagi pendanaan alternatif.

Arah Kebijakan Pembiayaan Publik untuk Pembangunan IKN

Arah kebijakan pembiayaan publik untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara terlihat jelas melalui berbagai dokumen anggaran dan perencanaan pemerintah. Dokumen APBN, Nota Keuangan, serta rencana pembangunan nasional menempatkan IKN sebagai salah satu prioritas strategis yang memerlukan dukungan fiskal pada tahap awal. Dalam dokumen-dokumen tersebut, pemerintah mengarahkan pembiayaan IKN melalui penguatan belanja modal negara, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai tidak dapat menunggu keterlibatan sektor non-APBN. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembiayaan publik pada periode awal pembangunan IKN berorientasi pada penyediaan fasilitas minimum yang memungkinkan kawasan inti pemerintahan dapat segera beroperasi.

Selain itu, arah kebijakan fiskal juga menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan pembiayaan jangka panjang. Dalam Nota Keuangan dan kebijakan fiskal makro, pemerintah menyatakan bahwa APBN berperan sebagai pendanaan awal yang diharapkan mampu membuka jalan bagi masuknya investasi swasta melalui skema non-APBN seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, dokumen kebijakan menegaskan dual function pembiayaan APBN: membangun infrastruktur vital sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif untuk menarik pendanaan alternatif.

Kebijakan pembiayaan publik juga diarahkan agar pembangunan IKN tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan. Hal ini tercermin dalam penekanan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran pembangunan IKN dengan prioritas anggaran nasional lainnya. Dokumen perencanaan menekankan bahwa pengelolaan fiskal harus memperhatikan stabilitas jangka panjang, sehingga perluasan peran pendanaan non-APBN menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pembiayaan publik yang tertuang dalam dokumen pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan IKN diposisikan sebagai prioritas yang membutuhkan pendanaan awal dari APBN, namun dengan strategi bertahap untuk mengalihkan sebagian kebutuhan pendanaan kepada sektor non-pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara komitmen pembangunan dan keberlanjutan fiskal nasional.

Implikasi Strategis

Analisis terhadap arah kebijakan pembiayaan publik menunjukkan bahwa penggunaan APBN sebagai fondasi awal pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki sejumlah implikasi strategis yang signifikan bagi tata kelola fiskal dan dinamika pembangunan nasional. Implikasi ini mencakup aspek stabilitas fiskal, percepatan pembangunan, keterlibatan sektor swasta, hingga keberlanjutan kebijakan jangka panjang.

1) Implikasi Strategis terhadap Stabilitas Fiskal

Temuan kajian menunjukkan bahwa dominasi APBN dalam tahap awal pembangunan IKN memberikan dampak dualistik bagi stabilitas fiskal nasional. Di satu sisi, alokasi belanja negara pada sektor infrastruktur dasar mampu berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan katalis pertumbuhan, terutama ketika proyek tersebut masih berada pada fase yang belum bankable. Dalam beberapa literatur, belanja negara pada proyek prioritas nasional dipandang dapat memperkuat persepsi kepastian pembangunan dan meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah (Putri et al., 2024).

Namun, ketergantungan yang besar terhadap pendanaan APBN juga menghadirkan potensi tekanan fiskal. Pengalokasian anggaran multiyears untuk IKN menyebabkan terjadinya redistribusi ruang fiskal, yang pada jangka menengah dapat membatasi kapasitas belanja sektor publik lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Risiko crowding-out belanja prioritas lain menjadi lebih besar apabila dukungan pembiayaan non-APBN tidak berkembang secara signifikan. Penelitian Putri & Putri (2020) juga menunjukkan bahwa pembiayaan non-APBN di Indonesia masih menghadapi hambatan teknis dan regulatif, sehingga kontribusinya belum dapat mengurangi beban APBN secara optimal.

Dengan demikian, secara strategis, APBN memainkan peran penopang utama, namun keberlanjutan fiskalnya memerlukan dukungan mekanisme pembiayaan alternatif. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kunci agar konsistensi fiskal tidak terganggu oleh komitmen pembangunan jangka panjang seperti IKN.

2) Implikasi Strategis terhadap Percepatan Pembangunan

Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan APBN secara langsung berkontribusi pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan IKN. APBN memberikan kepastian pendanaan untuk proyek-proyek yang bersifat non-revenue generating seperti jalan akses, jembatan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik yang tidak menarik bagi investor swasta pada tahap awal. Hal ini sejalan dengan konsep dasar kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi dan penjaminan pembangunan awal pada proyek-proyek besar yang memiliki manfaat publik luas.

Keberadaan APBN sebagai sumber pembiayaan utama juga mempercepat proses pengadaan, penyelesaian proyek prioritas, serta memberikan kepastian kepada kontraktor dan pemangku kepentingan lain. Namun, percepatan pembangunan tetap menghadapi tantangan, terutama dalam integrasi antara proyek APBN dan proyek non-APBN. Ketika skema KPBU atau pembiayaan swasta belum optimal, percepatan pembangunan berpotensi mengalami ketidakseimbangan, di mana fasilitas dasar telah tersedia tetapi investasi komersial belum mengikuti secara proporsional. Temuan ini konsisten dengan hasil studi Susantono & Berawi (2012) yang menekankan pentingnya integrasi pembiayaan dalam pembangunan berbasis kemitraan.

3) Implikasi Strategis terhadap Keterlibatan Swasta

Keterlibatan swasta dalam pembangunan IKN merupakan elemen penting untuk mengurangi beban APBN dan memastikan keberlanjutan pendanaan jangka panjang.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi APBN pada tahap awal justru menciptakan persepsi pasar bahwa risiko investasi masih tinggi. Pada banyak proyek infrastruktur besar, swasta cenderung masuk ketika proyek telah menunjukkan tingkat kelayakan yang jelas dan risiko awal telah ditanggung oleh pemerintah (Prajaningtyas & Dinarjito, 2025).

Meskipun APBN berfungsi sebagai modal awal yang mengurangi risiko dasar, ketidakpastian dalam regulasi, struktur KPBU, dan jaminan proyek masih menjadi hambatan utama bagi investor. Rendahnya realisasi pembiayaan non-APBN menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk menarik keterlibatan swasta perlu diperkuat, baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan transparansi risiko, maupun desain skema pembiayaan yang lebih menarik, seperti asset-backed securities atau land value capture.

Dengan demikian, peran APBN seharusnya tidak hanya sebagai sumber pendanaan utama, melainkan sebagai instrumen pemicu yang mampu menciptakan ekosistem investasi yang kondusif bagi keterlibatan swasta.

4) Implikasi Strategis terhadap Keberlanjutan Kebijakan Jangka Panjang

Implikasi jangka panjang dari penggunaan APBN pada pembangunan IKN sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal dan tata kelola pembiayaan publik. APBN memberi fondasi awal bagi keberlanjutan pembangunan, tetapi keberlanjutan tersebut hanya dapat terjaga jika pembiayaan non-APBN mulai meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan.

Literatur pembiayaan publik menekankan bahwa proyek jangka panjang seperti pembangunan ibu kota baru memerlukan policy continuity agar tidak terhenti akibat perubahan politik, fiskal, atau ekonomi (Putri et al., 2024). Selain itu, keberlanjutan pembangunan jangka panjang membutuhkan mekanisme pembiayaan campuran yang terstruktur, di mana APBN, KPBU, dan investasi swasta saling melengkapi.

Jika struktur pembiayaan tetap bertumpu pada APBN, maka keberlanjutan proyek di masa depan berisiko terganggu. Sebaliknya, apabila pemerintah mampu menyeimbangkan peran fiskal dan mendorong masuknya skema pembiayaan alternatif, maka IKN dapat berkembang menjadi kawasan yang mandiri secara fiskal dan operasional dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki implikasi strategis terhadap penguatan stabilitas fiskal, percepatan pembangunan nasional, peningkatan keterlibatan swasta, serta keberlanjutan kebijakan jangka panjang. Model pembiayaan campuran antara APBN dan investasi swasta dinilai mampu mengurangi tekanan fiskal, namun tetap membutuhkan tata kelola yang transparan agar risiko fiskal dapat dikendalikan. Selain itu, integrasi perencanaan lintas sektor dan keberlanjutan proyek menjadi kunci agar pembangunan tidak berhenti pada pergantian pemerintahan.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, kepastian investasi, serta penguatan koordinasi lembaga agar pembangunan IKN dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai risiko jangka panjang dan efektivitas skema pendanaan alternatif dalam memastikan keberlanjutan proyek. Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis pembiayaan non-anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. (2020). *Jurnal Infrastruktur*, 6(2), 91–103.
- ANTARA News. (2024, January 2). Menkeu: Realisasi anggaran IKN 2023 capai Rp26,7 triliun. <https://www.antarane.ws.com/berita/3896934>
- ANTARA News. (2024, January 6). Pemerintah gelontorkan anggaran untuk IKN Rp43,4 triliun selama 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/4566314>
- ANTARA News. (2025, August 15). Pemerintah anggarkan Rp6,3 triliun untuk IKN pada RAPBN 2026. <https://www.antarane.ws.com/berita/5042765>
- Ardalepa, N. (2023). Keadilan dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 3(1), 162–179.
- BBC Indonesia. (2022, January 17). Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN, pakar sebut “beban berat.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Parliamentary review: Pendanaan IKN—Kombinasi APBN, KPBU, swasta, dan skema lainnya*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-4-D-2023.pdf
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). *Sekilas mengenai rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126>
- Ilmia, A. (2022). Sukuk negara dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Skema KPBU dan perannya dalam mendukung pembangunan IKN*. <https://kpbu.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta APBN tahun anggaran 2025*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2026*. <https://media.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, November 29). Pemerintah luncurkan regulasi pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur. <https://ekon.go.id>
- Maramis, J. B. (2018). Faktor-faktor sukses penerapan KPBU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur: Suatu kajian. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi)*, 5(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025). Pasca Perpres 79/2025, IKN bersiap bangun kawasan legislatif dan yudikatif, infrastruktur, dan sumber daya manusia. <https://www.ikn.go.id>
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025). *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2025 tentang rencana strategis Otorita IKN Tahun 2025–2029*. <https://ikn.go.id>
- PBNU. (2024, June 12). Lembaga perekonomian PBNU: Pendanaan IKN tak boleh dari APBN. <https://www.nu.or.id>

- Prajaningtyas, W., & Dinarjito, A. (2025). Asset-backed securities in Indonesia: A strategic alternative for infrastructure financing. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(1), 49–63.
- Republika Online. (2024). Kemenkeu: Realisasi anggaran untuk IKN hingga Agustus 2024 capai Rp18,9 triliun. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/skak8m370>
- Sadewa, P. Y. (2025, October 2). Purbaya siapkan skema campuran APBN, KPBU, dan FDI untuk biayai IKN. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Susantono, B., & Berawi, M. A. (2012). Perkembangan kebijakan pembiayaan infrastruktur transportasi berbasis kerja sama pemerintah swasta di Indonesia. *Jurnal Transportasi*, 12(2), 93–102.